

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dapat dikatakan sejahtera apabila pemerintahnya dapat mengatur pembangunan baik secara ekonomi maupun pembangunan secara manusianya. Dimana Indeks Pembangunan manusia memiliki peran penting dalam mengukur daya saing serta kualitas sumber daya manusia dengan negara-negara lain.

Komponen atau nilai untuk mengukur keberhasilan ekonomi antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*), dan kebebasan (*freedom*) yang merupakan tujuan yang harus dicapai setiap masyarakat (Todaro, 2000). Dalam pelaksanaannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara-negara berkembang karena merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai upaya dalam mengurangi kemiskinan, dan salah satu indikator penting didalam pembangunan ekonomi adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Ada tiga indikator yang sering dipakai dalam mengukur kesuksesan dalam pembangunan manusia yaitu indikator kesehatan (dilihat dari angka harapan hidup), pendidikan (dilihat dari angka melek huruf orang dewasa serta tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi) dan standar layak hidup (diukur dari daya beli serta penghasilan), ketiga indikator tersebut belumlah ukuran secara menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi ketiga indikator tersebut mampu menggambarkan sudut pandang yang lebih luas terhadap rumitnya menghitung kemajuan manusia dari rumitnya penghasilan dan kesejahteraan itu sendiri(UNDP, 1990)

Dalam konsep pembangunan ekonomi islam manusia menjadi fokus utama selain tauhid, tazkiah an-nafs, serta peran pemerintah. Manusia merupakan makhluk pembangun merupakan mandataris ilahi yang mengelola sumber daya alam serta lingkungan . sebagaimana pesan dalam Q.S Hud 61

* وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي
قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

Dalam surat Al Hud ayat 61 di terangkakan bawasannya manusia dijadikan Allah sebagi khalifah dimuka bumi ini mengemban tugas untuk memakmurkan, ayat diatas dipahami bahwa manusia melakukan pembangunann.

Dalam IPM sendiri terdapat tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang akan dikaitkan dengan peningkatan produktivitas dimana akan meningkatkan pendapatan pula, kesehatan juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan penduduk dimana akan meningkatkan partisipasi kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa peningkatan pendidikan serta pengembangan potensi diri yang akan menyumbang pada pertumbuhan ekonomi dan akan meningkatkan pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).

Teori Cobb-Douglas menerangkan bahwa pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi tidak akan lepas dari modal sumber daya manusianya, oleh karena itu untuk memacu pertumbuhan ekonomi maka perlu juga dilakukan pembangunan manusia termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan sumber daya manusianya agar kinerja ekonomi bisa meningkat dan tidak tertinggal dengan daerah lainnya.

Dalam pembangunan ekonomi pemerintah memiliki berbagai peran, terdapat tiga peran utama yang harus dilaksanakan pemerintah dalam mendorong perekonomian, menurut Guritno (2001), yaitu :

1. Peran Stabilisasi, dimana pemerintah berpeperan sebagai stabilitator dalam menjaga perekonomian agar berjalan dengan normal.
2. Peran Distribusi, dimana pemerintah membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumberdaya ekonomi dapat dilaksanakan dengan efisien dan semua lapisan masyarakat merasakannya.
3. Peran Alokasi, pemerintah didorong untuk menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki agar dapat digunakan untuk membuat barang-barang individu, pemerintah harus menentukan barang-barang yang dibutuhkan publik, serta mengukur seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah dan seberapa besar yang harus disediakan oleh rumah tangga perusahaan. Hal ini harus dilakukan karena pada dasarnya sumber daya yang dimiliki pemerintah mempunyai keterbatasan.

Berjalannya waktu kegiatan pemerintah akan terus meningkat dalam menjalankan ketiga peran tersebut, tentunya dalam menjalankan ketiga peran tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit, maka dari itu pengeluaran pemerintah merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah dalam mengambil dan menerapkan ketiga peran tadi

Sumber keuangan pemerintah daerah sudah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang mana tertancum di dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menciptakan pendapatan dan dapat mengatur alokasi untuk kepentingan pembangunan di daerah secara mandiri dan sesuai dengan aspirasi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menggunakan APBD untuk membiayai pembangunan di sektor yang berkaitan dengan pembangunan manusia (Maryani, 2010). Secara lebih spesifik pemerintah mengalokasikan belanja melalui pengeluaran yang mendukung sektor-sektor pendukung yang nantinya akan memiliki dampak meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Kemiskinan dipandang menjadi masalah yang cukup serius dalam pembangunan manusia, bermula dari tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan menjadi terabaikan. Hal tersebut menjadikan terjadinya gap diantara kedua yang menjadikan target pembangunan manusia dari pemerintah tidak terealisasi dengan baik (Mirza, 2012). Dari sudut pandang ekonomi hal tersebut akan menghasilakan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, dimana hal ini berimbas pada upah yang terbatas yang didapat masyarakat, dalam perkembangannya hal ini akan berdampak pada tingkat pembangunan manusia.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak daerah yang setiap daerahnya memiliki potensi , keunggulan dan perbedaan alokasi yang berbeda-beda, perbedaan aloksi anggaran bisa dilihat dari jumlah pemberian anggaran yang diberikan pemerintah kepada masing masing daerah. Dana yang diberikan bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan

Kabupaten/Kota, serta beberapa pinjaman dari luar negeri serta sumber dana pemerintah yang lain.

Dikawasan ASEAN Indonesia dalam hal pembangunan manusia masuk dalam kelompok medium setara dengan Filipina, Timor Leste, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

**Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Negara Kawasan
ASEAN, Tahun 2017**

No	Negara	Skor	Peringkat dunia	Perubahan peringkat IPM tahun 2012-2017	Rata-rata pertumbuhan (%) tahun 2010-2017	Kategori
1	Singapura	0.932	9	-2	0.36	Very High
2	Brunai Darussalam	0.853	39	-8	0.19	Very High
3	Malaysia	0.802	57	1	0.54	Very High
4	Thailand	0.755	83	4	0.59	High
5	Filipina	0.699	113	1	0.71	Medium
6	Indonesia	0.694	116	-1	0.69	Medium
7	Vietnam	0.694	116	1	0.85	Medium
8	Timor Leste	0.625	132	1	0.13	Medium
9	Laos	0.601	139	2	1.39	Medium
10	Kamboja	0.582	146	0	1.15	Medium
11	Myanmar	0.578	148	0	1.25	medium

Pada tabel diatas Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan angka 0.694 dengan progres pertumbuhan antara tahun 2010-2017 sebesar 0.69 pertahunnya, dilihat dari angka pertumbuhan setiap

tahunnya dalam rentang waktu tersebut pertumbuhan Pembangunan Manusia tergolong lambat, dalam data tahun 2017 ini peringkat Indonesia sudah disalip oleh Filipina yang sekarang berada di peringkat 113 , sedangkan Indonesia sendiri berada pada peringkat 116 bersaing ketat dengan Vietnam yang berada di peringkat yang sama dengan catatan pertumbuhan Pembangunan Manusia Vietnam sendiri angkanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia yaitu sebesar 0.85, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun lagi Indonesia akan tersalip oleh negara-negara ASEAN dibidang Pembangunan manusia. Pencapaian IPM Indonesia untuk sementara ini masih unggul dari Timor leste (132), Laos (139), Kamboja (146), Myanmar (148).

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sendiri setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Pada gambar diatas memperlihatkan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia Indonesia mengalami peningkata dari mulai tahun 2014 sampai tahun 2018. Pada tahun 2014 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia sebesar 68.90, tahun 2015 meningkat menjadi 69.55, tahun 2016 meningkat menjadi 70.18, tahun 2017 meningkat menjadi 70.81, dan ditahun 2018 meningkat menjadi 71.39. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan nilai rata-rata sebesar 0.61(dalam satuan IPM).

Dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia yang telah diperlihatkan didalam gambar diatas Provinsi DKI Jakarta menempati Provinsi teratas dari segi nilai IPM dimana menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 nilai IPM DKI Jakarta sebesar 80.47sedangkan ditahun yang sama Provinsi Papua menempati Provinsi terbawah dari segi nilai, menurut data dari BPS 2018 Provinsi Papua hanya memiliki nilai sebesar 60.06.

Peran pemerintah sangat di perlukan dalam usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia agar gap dari segi nilai antara Provinsi teratas dan Provinsi terbawah tidak terlampau jauh, lebih dari itu agar daya saing sumber daya manusia Indonesia tidak kalah dari negara-negara di kawasan ASEAN dimana dalam kurun antara tahun 2013 sampai tahun 2017 nilai HDI (human development Indeks) kita sudah disalip oleh negara tetangga yaitu Filiphina. Perlu diketahi bersarnya peran pemerintah terhadap faktor sumber daya manusia, peran pemerintah saat ini yaitu : kebijakan pemberian anggaran untuk bidang pendidikan dan kesehatan serta upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan pendekatan PDRB rill per kapita. Dengan peran pemerintah diharapkan pembangunan manusia Indonesia berjalan dengan baik, sehingga sumber daya manusia Indonesia semakin meningkat dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Dari uraian diatas, maka dalam penelitian ini akan melihat seberapa jauh pengaruh faktor-faktor seperti PDRB (produk domestik regional bruto), belanja pemerintah dan kemiskinan dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di 34 Provinsi di Indonesia, karenanya penelitian ini berjudul **“Pengaruh Belanja Daerah, PDRB, dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap IPM Tahun 2014-2018 (Studi 34 Provinsi di Indonesia).**

B. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan pada pokok pembahasan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup agar penelitaian ini tidak menyimpang dari sasaran. Dalam penelitian ini hanya akan membahas pengaruh dari PDRB (produk domestik regional bruto), Belanja Daerah dan Jumlah penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diawal, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh dari PDRB (produk domestik regional bruto) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh dari belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
3. Bagaimana pengaruh dari jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitin ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB (produk domestik regional bruto) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan masalah indeks pembangunan manusia
2. Bagi akademis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literature dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Bagi publik, diharapkan penelitian ini bisa memberi informasi dan gambaran mengenai indeks pembangunan manusia.